

Pengantar Redaksi

Jurnal ETNOHISTORI kembali hadir menjumpai pembaca sekalian dalam volume baru, yakni Volume II, Edisi 1, April 2016. Perlu kami sampaikan bahwa Volume I jurnal terdiri dari edisi satu hingga edisi empat. Dengan kata lain, kami terbit satu volume dengan empat edisi.

Melalui edisi ini, Redaksi perlu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal ini.

Pertama, Redaksi mengabarkan bahwa **Jurnal ETNOHISTORI** telah tampil secara daring dan pembaca dapat mengunjunginya di laman kami di <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/etnohis>. Langkah ini dilakukan mengingat ketentuan Dirjen Dikti R.I tentang standard baku suatu jurnal ilmiah.

Kedua, **Jurnal ETNOHISTORI** akan terbit dengan delapan naskah/artikel setiap edisi sejak volume kedua ini. Sebagai diketahui, pada Volume I, setiap edisi hanya memuat enam naskah tiap edisinya. Redaksi memahami bahwa publikasi saat ini sudah menjadi tuntutan bagi kalangan akademisi (dosen) untuk menunjang profesi. Sayangnya, upaya 'berani' dari Redaksi jurnal ini belum mendapat sambutan yang cukup menggembirakan dari kalangan penulis/kontributor. Serupa tantangan yang dihadapi pada edisi-

edisi sebelumnya, Redaksi masih kesulitan menghimpun naskah yang layak muat. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada para kontributor jurnal ini yang telah mengupayakan waktu dan merelakan naskahnya dimuat di sini.

Ketiga, Redaksi **Jurnal ETNOHISTORI** memutuskan untuk mengubah perwajahan jurnal dalam hal pemilihan huruf yang digunakan di dalam artikel. Kami mendapatkan banyak masukan dari beberapa kalangan mengenai aspek keterbacaan pada naskah-naskah kami sebelumnya. Setelah melalui diskusi dan tanggapan yang diperoleh Redaksi, akhirnya kami menetapkan jenis dan ukuran huruf, sebagai yang sedang Anda baca ini.

Sebanyak delapan naskah dalam edisi ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema. Dua tulisan pertama mendiskusikan tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Diah Irawaty mendiskusikan tentang bagaimana material sejarah bisa menjadi kekuatan politik dalam propaganda anti-PKI. Dengan memahami kekuatan material sejarah dalam propaganda politik, ia menawarkan pemahaman ulang atas objek-objek sejarah sebagai respon kritis sekaligus membersihkan pengaruh politisasi Soeharto atas komunisme dan PKI.

Artikel kedua, masih topik PKI, ditulis Ikhtiar Hatta. Ia mendiskusikan variasi respons masyarakat setelah terjadinya peristiwa G. 30 S/PKI. Melalui penelitian mini etnografi, ia mendalami fenomena ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih memadai. Ia juga menggali kekuatan kultural masyarakat subjek penelitiannya sehingga mampu mentransformasikan memori 1965 yang sarat konflik sehingga menjadi suasana yang harmonis di tengah konteksasi di antara warga masyarakat.

Tiga artikel berikutnya mendiskusikan tentang kearifan lokal. Artikel Syahyunan Pora mengidentifikasi nilai kearifan lokal dalam budaya dan tradisi lisan masyarakat Ternate. Menurut penulisnya, tradisi lisan masyarakat Ternate, termasuk sastra lisan di dalamnya, mengandung banyak nasihat, bimbingan, dan pedoman moral yang mengajak kita untuk hidup dan merayakan kehidupan dengan bijaksana. Melalui hasil penelitian pustaka, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ide-ide dan solusi untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Artikel berikutnya ditulis oleh Aliong Mus, seorang Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, mendiskusikan tentang kearifan lokal pada masyarakat Pulau Taliabu. Dengan menerapkan batasan kearifan lokal dari berbagai ahli sosial budaya yang dipilihnya, ia mengidentifikasi

beberapa keluhuran budaya dalam tradisi masyarakatnya. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Pulau Taliabu memiliki banyak kearifan lokal, baik berbentuk nilai-nilai budaya, perilaku atau tindakan dalam sistem sosial, maupun dalam bentuk budaya materil (artefak) berupa benda-benda hasil karya. Pentingnya Kearifan Lokal sebagai modal sosial pembangunan daerah dalam menumbuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat lokal dalam program-program pembangunan.

Selanjutnya, artikel ditulis Karsiwan dkk, mendiskusikan tentang pengembangan proses pembelajaran IPS dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Temuannya menunjukkan bahwa bahwa pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai kearifan lokal mampu memberikan alternatif proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sekaligus menantang bagi siswa. Pembelajaran IPS dengan berpijak pada tema-tema kearifan lokal sangat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah.

Ketiga artikel terakhir mendiskusikan tema-tema yang berlatar kerajaan atau kesultanan. Dua di antaranya meninjau sejarah lokal dengan pendekatan sejarah, sedangkan satunya dengan perspektif antropologi.

Artikel yang ditulis Rustam memaparkan hubungan antara Maluku dengan Papua untuk menunjukkan peran Sultan Tidore, Zainal Abidin Alting. Lebih jauh, ia

mengurai peran Zainal Abidin Alting dalam turut mempertahankan Papua (Irian Barat) sehingga tetap menjadi bagian dari NKRI. Karena peranannya ini, menurut Rustam, mengantarkan Zainal Abidin Alting menuju pelantikan sebagai gubernur pertama Papua oleh Presiden Soekarno pada 23 September 1956.

Artikel Irfan Ahmad menelaah eksistensi Limau Besi, Kerajaan Makeang, dalam Dunia Maluku. Berdasarkan kajian arsip kolonial dengan pendekatan metodologi sejarah, ia mengajukan argumentasinya bahwa Orang Makeang di masa lalu yang direpresentasikan sebagai etnis terkemuka ulet dan pekerja keras, menjelang abad ke XV mendapat tekanan dan mengakui kehebatan Kerajaan Ternate dan Tidore. Sayangnya, gambaran sejarah dan representasi tentang orang Makeang sebagai kaum terkemuka pada masa lalu mengalami keterpurukan hingga abad ke-20.

Artikel Septi Satriani mendiskusikan tentang bagaimana abdi dalem dipersatukan dalam sebuah konsep *peranakan* dan *serat kekancingan*. Bagi penulis, *peranakan* tidak sekadar menggambarkan seragam abdi dalem, melainkan di dalamnya terkandung makna persaudaraan dan persatuan baik dengan Raja maupun di antara sesama abdi dalem. Ia menyimpulkan bahwa *peranakan* dan *serat kekancingan* merupakan simbol 'kepengaturan' bagi abdi dalem Kraton Jogjakarta. Dengan

menggunakan *peranakan* dan *serat kekancingan*, seorang abdi dalem Kraton Jogjakarta harus berperilaku sesuai dengan makna yang terkandung di dalam keduanya.

Akhirnya, Redaksi menyampaikan selamat membaca!

Redaksi